



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SRIYANTO  
NIK : 3309100404699006  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Unit Kerja : RSJD SURAKARTA  
Sub Unit Kerja : BAGIAN UMUM  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TU & HUKUM  
Jenis Laporan : Periodik - 2019  
Tanggal Kirim : 24 Februari 2020

**Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:**

Lengkap  
 Tidak Lengkap



*\*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN UMUM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TU & HUKUM
3. NHK : 211738

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di BOYOLALI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 280.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 179.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDAS Tahun 1976, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 84.814.061

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 548.314.061

**III. HUTANG** Rp. 202.868.860

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 345.445.201

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.